

**PERAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA,
PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN
PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR
EKONOMI KREATIF SENI PERTUNJUKAN DAN
KRIYA DI DESA WISATA PLUNTURAN,
KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO**

PROYEK AKHIR

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Diploma IV
Program Studi Destinasi Pariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung



Disusun Oleh:

SAVIRA AYU ADIANTY

201923176

**PROGRAM STUDI DESTINASI PARIWISATA
JURUSAN KEPARIWISATAAN**

**POLITEKNIK PARIWISATA NHI
BANDUNG**

2023

LEMBAR PENGESAHAN

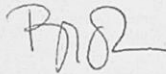
LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PROYEK AKHIR

PERAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI
KREATIF SENI PERTUNJUKAN DAN KRIYA DI DESA WISATA PLUNTURAN,
KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO

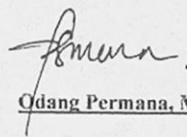
NAMA : SAVIRA AYU ADIANTY
NIM : 201923176
JURUSAN : KEPARIWISATAAN
PROGRAM STUDI : DESTINASI PARIWISATA

Pembimbing Utama,



Dr. Beta Budisetvorini, M.Sc.
NIP. 19720119 200212 2 001

Pembimbing Pendamping,


Odang Permana, M.E

Bandung, 15 Agustus 2023

Mengetahui,

Kabag. Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama,



Ni Gusti Made Kerti Utami, BA., MM.Par CIE.

NIP. 19730316 199603 2 001

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

JUDUL PROYEK AKHIR

PERAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONOROGO
DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI KREATIF SENI PERTUNJUKAN DAN KRIYA DI DESA
WISATA PLUNTURAN, KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO

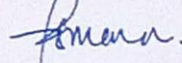
NAMA : SAVIRA AYU ADIANTY
NIM : 201923176
JURUSAN : KEPARIWISATAAN
PROGRAM STUDI : DESTINASI PARIWISATA

Pembimbing Utama,



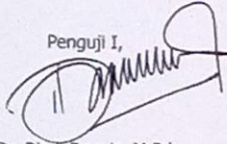
Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc.
NIP. 19720119 200212 2 001

Pembimbing Pendamping,



Odang Permana, M.E

Penguji I,



Dr. Riadi Darwis, M.Pd
NIP. 19660124 199203 1 001

Penguji II,



Rachmat Syam, S.Sos., M.M.Par
NIP. 19600505 198303 1 002

Bandung, 15 Agustus 2023

Mengetahui,

Kabag. Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerja Sama

Menyetujui,

Direktur Politeknik NHI Bandung

Ni Gusti Made Kerti Utami, BA., MM.Par CHE.
19710316 199603 2 001

Andar Danova L. Goeltom, S.Sos., M.Sc., CHE
NIP. 19710506 199803 1 001



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

PERNYATAAN MAHASISWA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Savira Ayu Adianty
Tempat/Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 Agustus 2000
NIM : 201923176
Program Studi : Destinasi Pariwisata
Jurusan : Kepariwisataan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir/Proyek Akhir yang berjudul:
“Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo” ini adalah merupakan hasil karya dan hasil penelitian saya sendiri, bukan merupakan hasil penjiplakan, pengutipan, penyusunan oleh orang atau pihak lain atau cara-cara lain yang tidak sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku di Politeknik Pariwisata NHI Bandung dan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
2. Dalam Tugas Akhir/Proyek Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang atau pihak lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber, nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dalam naskah Tugas Akhir/Proyek Akhir ini ditemukan adanya pelanggaran atas apa yang saya nyatakan di atas, atau pelanggaran atas etika keilmuan, dan/atau ada klaim terhadap keaslian naskah ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Politeknik Pariwisata NHI Bandung ini serta peraturan-peraturan terkait lainnya.
4. Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandung, 27 Juni 2023
Yang membuat pernyataan,


Savira Ayu Adianty

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Proyek Akhir Berjudul **“Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan.”**

Penyusunan Proyek Akhir ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Sarjana Terapan pada program studi Destinasi Pariwisata di Politeknik Pariwisata NHI Bandung.

Penulis ingin berterima kasih kepada pihak – pihak yang tidak lepas dari bantuan dan dukungannya dalam penyusunan Proyek Akhir yaitu kepada :

1. Andar Danova Lastaipa Goeltom, S.Sos., M.Sc. Selaku Direktur Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
2. Ibu Dr. E.R. Ummi Kalsum, M.M.Par.,CHM.,CHRMP. Selaku kepala bagian Administrasi Akademik, Kemahasiswaan dan Kerjasama Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
3. Ibu Endah Trihayuningtyas, S.Sos, MM.Par. Selaku ketua Jurusan Kepariwisata Politeknik Pariwisata NHI Bandung.
4. Ibu Wisi Wulandari, S.ST.Par., M.M.Par. Selaku Ketua Program Studi Manajemen Destinasi Pariwisata Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung.
5. Ibu Dr. Beta Budisetyorini, M.Sc. Selaku Pembimbing Utama.
6. Bapak Odang Permana, M.E. Selaku Pembimbing Pendamping.
7. Orang tua Peneliti, Setyo Budiyo dan Dwiana Sulistyani.

8. Anisa Talitha dan Zaila Nola, dua sahabat penulis yang telah senantiasa ada dikala senang dan susah.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan masukan dan saran dalam rangka membantu proyek penelitiannya. Akhir kata, penulis berharap bahwa Proyek Akhir ini akan bermanfaat bagi penulis dan pembaca secara umum.

Bandung, 27 Juni 2023

Penulis

ABSTRAK

Desa Wisata Plunturan merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dimana masih kental akan kebudayaan khas daerah Ponorogo serta dalam tahap mengembangkan ekonomi kreatif. Desa Wisata Plunturan mempunyai daya tarik ekonomi kreatif khususnya seni pertunjukan dan kriya, selain itu sudah ditetapkan sebagai Sesepeuh Reog oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Original oleh KEMENPAREKRAF. Adanya pengembangan ekonomi kreatif maka tidak terlepas akan dari Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Dalam hal ini, peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dinilai masih belum optimal, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi berupa peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan.

Kata Kunci: Desa Wisata Plunturan, Peran Pemerintah Daerah, Ekonomi Kreatif, Fasilitator, Regulator, Katalisator

ABSTRACT

Plunturan Tourism Village is an area located in Pulung District, Ponorogo Regency, which is still thick with the typical culture of the Ponorogo region and is in the stage of developing the creative economy. Plunturan Tourism Village has a creative economic attraction, especially performing arts and crafts, besides that it has been designated as an Elder of Reog by the Ministry of Education and Original Culture by the Ministry of Tourism and Creative Economy. If there is a development of the creative economy, it will be included from role of the Regional Government through the Ministry of Culture, Tourism, Youth and Sports (Disbudparpora) of Ponorogo Regency in accordance with the Regulations of the Ponorogo Government No. 138 of 2019 on Positioning, Organization Setting, Task Representation, Functions and Working Rules of the Ministries of Cultural, Tourist and Sports. In this case, the role of Disbudparpora Ponorogo Regency is considered still not optimal, so the purpose of this study is to find out and examine the extent of the role of Disbudparpora Ponorogo Regency as a Facilitator, Regulator, Catalyst in the development of the creative economy sector of performing arts and crafts in Plunturan Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. This research will produce recommendations in the form of the role of Disbudparpora Ponorogo Regency which must be carried out in the development of the creative economy of performing arts and crafts in Plunturan Tourism Village.

Keywords: *Plunturan Tourism Village, Role of Local Government, Creative Economy, Facilitator, Regulator, Catalyst*

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	ii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keterbatasan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
A. Kajian Teori	9
1. Ekonomi Kreatif.....	9
2. Desa Wisata.....	12
3. Pemerintah Daerah.....	13
4. Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif.....	14
B. Kerangka Pemikiran.....	21

BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Rancangan Penelitian	22
B. Partisipan dan Tempat Penelitian.....	23
C. Teknik dan Alat Pengumpulan Data	24
D. Analisis Data	26
E. Pengujian Keabsahan Data.....	29
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Hasil Penelitian	32
B. Pembahasan.....	68
BAB V SIMPULAN DAN REKOMENDASI	76
A. Simpulan	76
B. Rekomendasi.....	79
DAFTAR PUSTAKA	91
LAMPIRAN.....	94

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Matriks Komponen Penelitian	19
Tabel 2. Partisipan Penelitian.....	23
Tabel 3. Jadwal Penelitian	31
Tabel 4. Triangulasi Seni Pertunjukan	56
Tabel 5. Triangulasi Kriya	65
Tabel 6. Rekomendasi Seni Pertunjukan	79
Tabel 7. Rekomendasi Kriya	85

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Penelitian	21
Gambar 2. <i>Analysis Interactive Model</i> dari Miles & Huberman	28
Gambar 3. Reyog Ki Onggo Pati	36
Gambar 4. Gajah-Gajahan.....	36
Gambar 5. Tledhekan	37
Gambar 6. Karawitan	37
Gambar 7. Bumbung Suloyo.....	38
Gambar 8. Cokek'an	38
Gambar 9. Metik Desa	39
Gambar 10. Dadak Merak.....	39
Gambar 11. Gendang	40
Gambar 12. Tas Anyaman.....	40
Gambar 13. Kerajinan Bambu.....	41
Gambar 14. Struktur Organisasi Dinas, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Ponorogo	45

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1. Matriks Komponen Penelitian	19
Tabel 2. Partisipan Penelitian.....	23
Tabel 3. Jadwal Penelitian	31
Tabel 4. Triangulasi Seni Pertunjukan	56
Tabel 5. Triangulasi Kriya	65
Tabel 6. Rekomendasi Seni Pertunjukan	79
Tabel 7. Rekomendasi Kriya	85

PERAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN PONOROGO DALAM PENGEMBANGAN SEKTOR EKONOMI KREATIF SENI PERTUNJUKAN DAN KRIYA DI DESA WISATA PLUNTURAN, KECAMATAN PULUNG, KABUPATEN PONOROGO

Savira Ayu Adianty

Politeknik Pariwisata NHI Bandung

Email: savirayua@gmail.com

ABSTRAK

Desa Wisata Plunturan merupakan wilayah yang berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo yang mempunyai daya tarik ekonomi kreatif yaitu seni pertunjukan dan kriya, serta sudah ditetapkan sebagai Sesepeuh Reog oleh Kementerian Pendidikan dan Budaya Original oleh KEMENPAREKRAF. Adanya pengembangan ekonomi kreatif maka tidak terlepas akan dari Peran Pemerintah Daerah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora) Kabupaten Ponorogo sesuai dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga. Dalam hal ini, peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dinilai masih belum optimal, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan mengkaji sejauh mana peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi berupa peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo yang harus dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan.

Kata Kunci: Desa Wisata Plunturan, Peran Pemerintah Daerah, Ekonomi Kreatif, Fasilitator, Regulator, Katalisator

ABSTRACT

Plunturan Tourism Village is an area located in Pulung District, Ponorogo Regency which has a creative economic attraction, namely performing arts and crafts, and has been designated as a Reog Elder by the Ministry of Education and Original Culture by the Ministry of Tourism and Creative Economy. The development of the creative economy is inseparable from the role of the Regional Government through the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports (Disbudparpora) of Ponorogo Regency in accordance with the Ponorogo Regent Regulation Number 138 of 2019

concerning the Position, Organizational Structure, Job Description, Functions and Work Procedures of the Office of Culture, Tourism, Youth and Sports. In this case, the role of Disbudparpora of Ponorogo Regency is considered still not optimal, so the purpose of this study is to find out and examine the extent of the role of Disbudparpora of Ponorogo Regency as a Facilitator, Regulator, Catalyst in the development of the creative economy sector of performing arts and crafts in Plunturan Tourism Village. This research uses a descriptive method with a qualitative approach. Data collection techniques used by researchers are observation, interviews and documentation. This research will produce recommendations in the form of the role of Disbudparpora of Ponorogo Regency which must be carried out in the development of the creative economy of performing arts and crafts in Plunturan Tourism Village

Keywords: *Plunturan Tourism Village, Role of Local Government, Creative Economy, Facilitator, Regulator, Catalyst*

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor ekonomi kreatif khususnya pada seni pertunjukan dan kriya di Indonesia didukung oleh industri setiap daerahnya, salah satunya adalah Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Sesuai dengan RPJMD Kabupaten Ponorogo yang mempunyai tujuan untuk pengembangan pariwisata berbasis potensi daerah dan ekonomi kreatif dengan strategi mengembangkan ekonomi berbasis kreativitas. Selain itu, Kabupaten Ponorogo mendapat pengakuan dari dua kementerian sekaligus yaitu Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mengukuhkan Ponorogo sebagai Kabupaten/Kota (KaTa) Kreatif dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: SK/84/DI.01.00/MK/2022 serta dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Anugerah Kebudayaan Indonesia 2022 kepada Kabupaten Ponorogo. Sektor ekonomi kreatif yang menjadi unggulan di Kabupaten Ponorogo yaitu Sub Sektor Seni Pertunjukan, dengan penyokong lainnya yaitu Kriya dan Kuliner. (<https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/sah-ponorogo-kota-budaya>).

Potensi ekonomi kreatif di Kabupaten Ponorogo tersebar di berbagai desa contohnya pada Desa Wisata Plunturan

yang berada di Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo merupakan wilayah yang masih berkesinambungan dalam melestarikan kebudayaan khas daerah Ponorogo yaitu kesenian Reyog, Tledhekan, Gajah-gajahan, Cokek'an, Karawitan, Bumbung Suloyo. Desa Wisata Plunturan juga memproduksi berbagai kerajinan kriya diantaranya peralatan Reyog, tas anyaman dan kerajinan bambu. Desa Wisata Plunturan masuk kedalam sistem informasi (*platform*) JADESTA (Jejaring Desa Wisata) masuk ke dalam desa wisata rintisan yang dikelola oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan ditunjuk sebagai salah satu desa dengan budaya original oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam program "Indonesiana". Selain itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menetapkan seorang sebagai Maestro dan Sesepuh Reog di Desa Wisata Plunturan, serta Dahlan Iskan memberikan piagam sebagai Pengawal dan Pelestari Reog. Untuk menjaga kepercayaan tersebut, peran Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, sangat diperlukan. Adapun upaya yang sudah dilakukan dalam pengembangan ekonomi kreatif di Desa Wisata Plunturan yaitu masuk kedalam kalender wisata serta agenda rutin festival budaya. Meskipun demikian, peran pemerintah melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo (Disbudparpora) di Desa Wisata Plunturan dinilai masih belum optimal.

Berdasarkan hasil *survey*, dukungan dari Disbudparpora Kabupaten Ponorogo yang dilihat dari 3 peran diantaranya sebagai Fasilitator, Regulator, dan Katalisator masih minim. Dimana sebagai Fasilitator, belum memfasilitasi sarana dan prasarana hingga tidak adanya pembinaan yang dilaksanakan terkait ekonomi kreatif, belum terdapatnya pusat pertunjukan serta kesulitan permodalan dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif. Dari sisi Regulator, kebijakan akan ekonomi kreatif masih belum merata. Sementara pada sisi Katalisator, belum melibatkan dan kurang koordinasi dengan Pemerintah Desa.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian diatas Disbudparpora berperan penting dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan. Maka dalam rangka lebih mengoptimalkan peran tersebut, penelitian ini diarahkan pada “Peran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo”.

KAJIAN PUSTAKA

Ekonomi Kreatif

Dikutip dari Cetak Biru Ekonomi Kreatif 2025, ekonomi kreatif mencakup nilai tambah yang terdiri dari aspek ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Produk kreatif dihasilkan melalui gagasan-gagasan inovatif yang berasal dari SDM

yang kreatif, dan didasarkan dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan, termasuk warisan budaya dan teknologi. Ekonomi kreatif mempunyai 16 subsektor, dimana didalamnya terdapat seni pertunjukan serta kriya.

a. Seni Pertunjukan

Bagus Susetyo (2007) mengemukakan bahwa dalam seni pertunjukan, terdapat sebuah ungkapan budaya dimana seni pertunjukan itu berkembang dan tumbuh sesuai dengan zaman serta digunakan untuk mengungkapkan nilai-nilai budaya serta mencerminkan norma-norma estetik-artistik.

b. Kriya

Menurut Bastomi (2003), seni kriya dapat dikategorikan berlandaskan makna yang terkandung dalam produknya. Kategori pertama adalah produk-produk yang diciptakan sebagai lambang budaya seperti keris, pakaian adat, dan barang perabotan rumah tangga. Kategori kedua adalah barang-barang yang memiliki makna agama dan kepercayaan seperti topeng, patung, dan perahu yang dibuat dari bahan dengan nilai spiritual dan kualitas metafisik. Kategori ketiga adalah produk-produk terapan yang memiliki nilai praktis yang digunakan secara universal dan dapat disesuaikan dengan keunikan tradisi setempat. Kategori terakhir adalah produk-produk yang diciptakan dengan maksud ekonomi, seperti rotan, bambu untuk peralatan rumah tangga, perlengkapan interior, pakaian yang diproduksi untuk dijual.

Desa Wisata

Desa wisata yaitu cara untuk mengembangkan desa dengan

mengoptimalkan sumber daya yang ada tanpa mengubah karakteristik aslinya. Konsep ini lebih menekankan pada pengembangan potensi desa dengan menggunakan elemen-elemen yang tersedia di desa sebagai ciri khas produk wisata dalam skala kecil. Dengan cara ini, Desa Wisata mampu menyediakan serangkaian aktivitas atau kegiatan yang dapat memenuhi kebutuhan selama berwisata dari segi daya tarik dan fasilitas pendukung (A.J, Muljadi, 2012).

Priasukmana & Mulyadin (2013) mengemukakan bahwa Desa Wisata merupakan kawasan pedesaan yang memberikan nuansa pedesaan otentik, terdiri dari sosial budaya, adat istiadat, kehidupan sehari-hari, arsitektur bangunan, dan tata ruang desa yang khas.

Pemerintah Daerah

Definisi pemerintah adalah suatu badan atau organisasi yang memegang kekuasaan untuk menjalankan negara sebagai lembaga politik dan berfungsi sebagai aparat atau alat negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kekuasaan atau otoritas. Hal ini, pemerintah berwenang untuk menciptakan dan menegakkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu (Abdul Kadir, 2017).

Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Peran Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif

Menurut Soekanto (2013) peran merupakan bentuk perilaku yang diinginkan dari seseorang dalam konteks hubungan

sosial tertentu. Dalam kenyataannya, perilaku seseorang yang memainkan peran tersebut dapat dianggap sebagai serangkaian perilaku yang dipengaruhi oleh jabatan atau peran tertentu. Seperti halnya peran Pemerintah Daerah dalam pengembangan ekonomi kreatif yang dilihat dari 3 peran diantaranya,

a. Fasilitator

Menurut Diva (2009), pemerintah harus menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh pelaku ekonomi kreatif termasuk pelatihan dan pembinaan, pemberian bantuan atau berupa subsidi barang maupun jasa, serta membantu dalam mendapatkan akses ke pembiayaan/permodalan. Pendapat lain mengemukakan bahwa sebagai fasilitator, pemerintah dapat bergerak dibidang pendampingan melalui pelatihan, pendidikan, dan peningkatan keterampilan serta dibidang pendanaan atau permodalan melalui pemberian bantuan modal kepada para pelaku ekonomi kreatif (Anggreyni dkk, 2021)

b. Regulator

Sebagai regulator pemerintah membuat aturan atau program untuk ekonomi kreatif, memberikan acuan dasar yang selanjutnya dapat diterjemahkan oleh para pelaku ekonomi kreatif sebagai instrument untuk boleh dapat mengatur setiap kegiatan pelaksanaan ekonomi kreatif yang ada (Arif dan Adhawati, 2012). menurut Diva (2009) pemerintah mempunyai peran untuk menciptakan kebijakan yang memfasilitasi pertumbuhan usaha dalam ekonomi kreatif dengan mempermudah prosedur perizinan untuk usaha ekonomi kreatif, menetapkan suku bunga yang rendah, serta mengendalikan peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha.

c. Katalisator

Peran pemerintah selaku katalisator, ialah di mana pemerintah berperan selakuagen dalam akselerasi

peningkatan daerah yang berpotensi yang akan menjadi bentuk sosial dalam pembangunan partisipasi (Riska Firdaus, 2020). Selain itu, menurut Arif dan Adhawati (2012), pemerintah sebagai katalisator, maka pemerintah berposisi sebagai agen yang mempercepat pengembangan potensi yang dimiliki desa. Dimana hal ini berkaitan dengan pemerintah dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan. Dalam rangka mengoptimalkan peran pemerintah sebagai katalisator pemerintah juga perlu mendorong partisipasi pihak lain yang kompeten dalam pembangunan prasarana dan sarana pembangunan, seperti pihak swasta dan swadaya masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat serta memperhatikan kesiapan pemerintah dalam menyediakan modal bagi para pelaku ekonomi kreatif.

Dijelaskan lebih lanjut mengenai matriks komponen penelitian yaitu sebagai berikut:

Komponen	Dimensi	Indikator	Instrumen Penelitian
Facilitator	Sarana	- Fasilitas seni pertunjukan	Pedoman Wawancara
		- Fasilitas kerja	
	Prasarana	- Pusat pertunjukan	
		- Galeri Seni	
Persekolahan	- Memberikan pendanaan/modal pada pelaku ekonomi kreatif	Pedoman Wawancara	
	- Membantu menyediakan pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif		
Regulator	Kejelasan	- Regulasi perizinan	Pedoman Wawancara
		- Penetapan peraturan usaha	
	Produktivitas	- Meningkatkan produktivitas usaha kreatif	
		- Meningkatkan kualitas dan mutu usaha ekonomi kreatif	
Katalisator	Kemitraan	- Melakukan kemitraan dengan sesama pihak	Pedoman Wawancara
		- Kemampuan penyediaan dan pendampingan pada pelaku ekonomi kreatif	
	Pemenuhan	- Mengembangkan pemenuhan promosi dari sektor ekonomi kreatif	
	Reward	- Pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang bergengsi di bidang ekonomi kreatif	

Sumber: Dita (2009), Aggrey dkk (2011), Riska Firdaus (2020), Arif dan Adhawati (2012)

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Seperti yang dijelaskan oleh Nazir (2013), penelitian deskriptif adalah prinsip dalam melakukan penelitian pada suatu objek, di mana tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dengan sistematis, faktual, dan aktual mengenai sistem pemikiran, kondisi,

peristiwa, atau status kelompok manusia pada masa sekarang. Metode ini bermaksud untuk membeberkan hubungan antara fenomena yang sedang diteliti. Menurut Lexy J Moleong (2016), maksud dari pendekatan kualitatif yaitu memahami fenomena yang dihadapi oleh subjek penelitian seperti persepsi, perilaku, motivasi, dan tindakan menyeluruh dengan metode deskriptif melalui penggunaan kata-kata dan bahasa, dalam situasi yang alami. Penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode yang bersifat alamiah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi aktual serta mengkaji dari peran Pemerintah Daerah melalui Disbudparpora dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan serta kriya di Desa Wisata Plunturan kemudian akan menghasilkan rekomendasi berupa peran yang harus dilakukan oleh Disbudparpora dalam pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan. Partisipan pada penelitian ini diantaranya pihak-pihak yang berperan serta memiliki kaitan pada pengembangan sektor ekonomi kreatif seni pertunjukan dan kriya di Desa Wisata Plunturan diantaranya, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disbudparpora Kabupaten Ponorogo, Kepala Desa Wisata Plunturan, Pokdarwis Desa Wisata Plunturan, Pelaku Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan. Penelitian ini dilakukan di Desa Wisata Plunturan, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur.

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah observasi, wawancara, dokumentasi dengan analisis berupa pengkodean (coding), yang terbagi atas tiga tahapan yaitu *open coding*, *axial coding*, dan *selective coding*. Proses pengkodean tersebut harus dilaksanakan secara bertahap. Dalam penelitian ini, tiga tahap pengkodean tersebut digunakan oleh peneliti untuk menganalisis data. Selain itu, peneliti menggunakan model interaktif sebagai teknik analisis data oleh

Miles dan Huberman (1984) dimana menganalisis data dengan interaktif secara berulang-ulang sampai data menjadi jenuh. Adapun kegiatan dalam analisis terbagi ke dalam lima bagian diantaranya: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk Peran Disbudparpora Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan yang dilihat dari tiga aspek yaitu sebagai Fasilitator, Regulator, Katalisator, maka peneliti akan membahas mengenai:

1. Peran Disbudparpora dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Sub Sektor Seni Pertunjukan di Desa Wisata Plunturan
 - a. Fasilitator

Sebagai Fasilitator, Disbudparpora melaksanakan pemberian fasilitas untuk kegiatan pementasan seni pertunjukan di dalam daerah maupun ke luar daerah yang ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan bersama. Jika terdapat agenda kegiatan pementasan, Disbudparpora memfasilitasi para tim kesenian secara bergantian untuk ikutserta dalam kegiatan yang diselenggarakan termasuk dalam hal sarana dan prasarana. Sesuai dengan peran Pemerintah sebagai Fasilitator yaitu menunjang kegiatan pembangunan bukan hanya befokus pada pemberian sarana, namun juga harus memperhatikan prasarana yang ada karena akan berpengaruh terhadap jalannya usaha ekonomi kreatif Anggreyni dkk, (2021). Tetapi dalam hal memfasilitasi melalui pembinaan, Disbudparpora belum melaksanakan kegiatan tersebut

untuk desa melainkan Disbudparpora hanya mengajak, mempromosikan, menampilkan potensi yang dimiliki oleh Desa.

Dalam hal ini, Desa Wisata Plunturan masih belum menerima fasilitas sarana prasarana, pendanaan, maupun pembinaan dari Disbudparpora hanya saja pernah berkunjung ke Desa untuk kepentingan *ceremonial* sewaktu ada kegiatan. Namun untuk pembinaan, Desa Wisata Plunturan pernah mendapat pembinaan dari pihak lain yaitu Akademisi. Pembinaan yang dilakukan yaitu terkait Pengembangan Ekonomi Kreatif berbasis Budaya Lokal serta pembinaan UMKM.

Salah satu faktor yang mempengaruhi belum adanya bantuan permodalan, fasilitas, maupun pembinaan dari Disbudparpora untuk Desa Wisata Plunturan yaitu kurangnya jalinan komunikasi antar keduanya. Dimana Desa Wisata Plunturan sudah berupaya melalui rekanan untuk mengajukan lokasi pembinaan ke Disbudparpora, tetapi sampai saat ini masih belum bisa tersampaikan. Dalam hal ini, Disbudparpora memang belum menerima proposal atau pengajuan dari Desa ke Dinas terkait hal tersebut, maka koordinasi masih belum dapat tercapai. Maka dapat dikatakan Peran Disbudparpora sebagai Fasilitator dalam hal pengembangan seni pertunjukan belum optimal.

- b. Regulator

Peran Disbudparpora sebagai Regulator yaitu membuat aturan untuk memberikan acuan dasar bagi para pelaku ekonomi kreatif. Menurut Riska Firdaus (2020) Regulator merupakan peran penting

yang menjadi pedoman dalam menyeimbangkan pengelolaan pembangunan agar dapat berjalan efektif. Dalam hal ini, Pemerintah Kabupaten Ponorogo menerbitkan peraturan yang membentuk Bidang Ekonomi Kreatif pada Disbudparpora, dimana bertugas untuk melaksanakan pengembangan ekonomi kreatif termasuk seni pertunjukan seperti halnya menyiapkan bahan promosi wisata dan ekonomi kreatif untuk event-event regional, nasional, internasional. Dengan adanya peraturan yang dijalankan, maka akan mempermudah bagi pelaku seni pertunjukan.

Upaya yang dilakukan Disbudparpora untuk mendorong produktivitas dan kualitas yaitu mengikutsertakan Desa Wisata Plunturan dalam pengadaan festival pementasan, hal ini termasuk kedalam tugas dari Disbudparpora untuk menyiapkan bahan promosi ekonomi kreatif. Disbudparpora melakukan publikasi dengan cara promosi melalui sosial media untuk potensi yang dimiliki Desa. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu akan terjadi peningkatan produktivitas dan kualitas dari seni pertunjukan di Desa Wisata Plunturan. Hal ini juga disampaikan oleh Riska Firdaus (2020) bahwa peran Pemerintah sebagai Regulator mencangkup meningkatnya produktivitas dan kualitas dari usaha ekonomi kreatif.

c. Katalisator

Sebagai Katalisator, peran Disbudparpora yaitu menjalin koordinasi dengan semua pihak serta mendorong semangat para pelaku seni pertunjukan untuk lebih menjadi antusias. Diva (2009) mengemukakan bahwa peran Pemerintah pada Katalisator adalah

mempercepat proses pertumbuhan dan perkembangan usaha ekonomi kreatif dengan cara pemberian penghargaan kepada pelaku usaha yang bergerak di bidang ekonomi kreatif. Langkah yang dilakukan Disbudparpora yaitu didalam kegiatan maupun perlombaan yang diadakan Disbudparpora akan diberikan sertifikat penghargaan, tetapi sejauh ini Desa Wisata Plunturan belum mendapatkannya.

Di sisi lain, Desa Wisata Plunturan telah menerima penghargaan dari lembaga lain, bukan dari Disbudparpora. Penghargaan yang dicapai Desa Wisata Plunturan diantaranya, Desa ini menjadi Maestro Sesepeh Reyog dari Kementrian Pendidikan, Dahlan Iskan memberikan piagam sebagai Pelestari Reyog, Akademisi serta KEMENPAREKRAF menunjuk Desa Wisata Plunturan sebagai Budaya Original.

Perihal koordinasi, Disbudparpora berusaha untuk mengoptimalkannya, hal ini dikarenakan hubungan antar keduanya masih minim. Sebenarnya koordinasi yang terjalin sudah ada tetapi belum maksimal. Desa Wisata Plunturan beranggapan bahwa Disbudparpora sudah mengetahui bahwa Desa Wisata Plunturan masuk sebagai Desa Wisata dengan Budaya Original namun hal tersebut masih belum dapat maksimal hanya sekedar tahu saja. Maka seperti yang disampaikan oleh (Arif dan Adhawati, 2012) bahwa Pemerintah juga perlu mendorong terjadinya koordinasi dan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat masih belum terpenuhi.

2. Peran Disbudparpora dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Sub Sektor Kriya di Desa Wisata Plunturan

a. Fasilitator

Sebagai Fasilitator, Disbudparpora mengupayakan pemenuhan kebutuhan dan fasilitas para pelaku kriya seperti pelatihan dan membantu dalam hal permodalan. Sehubungan dengan ini, Disbudparpora berupaya untuk memfasilitasi para pelaku jikalau terdapat kegiatan pameran kreativitas maupun membawa produk ke luar daerah. Sistemnya, produk yang dimiliki diajukan kepada Disbudparpora untuk diseleksi terlebih dahulu hingga dipilih yang memenuhi syarat. Menurut Diva (2009), pemerintah harus menyediakan pemenuhan kebutuhan dan fasilitas para pelaku kriya seperti pelatihan dan pemberian bantuan berupa subsidi barang maupun jasa serta membantu dalam mendapatkan akses ke pembiayaan/permodalan. Namun, pada Desa Wisata Plunturan masih belum menerima fasilitas maupun bantuan permodalan dikarenakan terdapat kendala dalam hal pengajuan Disbudparpora untuk ikutserta dalam kegiatan yang diselenggarakan. Maka dapat disimpulkan bahwa Peran Disbudparpora dalam hal Fasilitator untuk pengembangan kriya di Desa Wisata Plunturan masih sangat minim.

b. Regulator

Peran Disbudparpora sebagai Regulator yaitu membuat kebijakan atau peraturan yang mempermudah jalannya suatu usaha ekonomi kreatif sub sektor kriya serta melihat kemampuan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas dari produk kriya. Usaha yang sudah dilaksanakan oleh Disbudparpora yaitu menerbitkan perizinan untuk

penangkaran merak melalui SK Bupati untuk memudahkan para pengrajin dadak merak. Namun kemampuan Disbudparpora untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas masih minim dikarenakan pelaku kriya merasa Disbudparpora belum melakukan apa-apa, dalam hal ini disebutkan bahwa indikator dari peran Pemerintah Daerah sebagai Regulator yaitu mampu meningkatkan mutu dan kualitas hasil usaha ekonomi kreatif (Riska Firdaus 2020) masih belum optimal.

Pelaku kriya merasa terbantu dengan adanya pembinaan dari Akademisi untuk produk yang dibuat karena dibantu dalam hal pengemasan produk hingga pemasarannya untuk menjamin produktivitas dan kualitasnya.

c. Katalisator

Sebagai Katalisator, Peran Disbudparpora yaitu menjalin koordinasi dan kerjasama antar pihak dan memiliki kemampuan untuk penyuluhan, serta mengembangkan pemasaran dalam hal pengembangan ekonomi kreatif sub sektor kriya. Sesuai yang disampaikan oleh Arif dan Adhawati (2012), posisi Katalisator bagi Pemerintah yaitu mempercepat pengembangan potensi yang dimiliki desa, berkaitan dengan Pemerintah dalam melihat dan mengkoordinir langsung faktor-faktor yang dapat mendorong laju perkembangan pembangunan. Dalam hal ini, peran Disbudparpora masih belum mencapai tingkat optimal dikarenakan terkendala perihal koordinasi. Dimana Disbudparpora dan Desa Wisata Plunturan belum memiliki keterhubungan yang mendalam melainkan hanya memiliki

pengetahuan dasar satu sama lain. Disbudparpora sedang berusaha untuk membangun koordinasi dan kerjasama yang lebih erat dengan Desa. Tujuannya adalah untuk melakukan sosialisasi dan penyuluhan terkait kegiatan yang akan diadakan. Perihal pemasaran untuk kriya, Disbudparpora membantu dalam hal promosi untuk keunggulan produk yang dimiliki oleh Desa Wisata Plunturan dengan mengadakan serangkaian kegiatan dari Festival Plunturan yang didalamnya akan terdapat pameran dari produk-produk kriya untuk dikenalkan dan dipasarkan kepada para pengunjung. Promosi yang dilakukan juga melalui media sosial seperti instagram, youtube, website resmi dari Disbudparpora. Hal ini sesuai dengan indikator yang telah dikemukakan oleh (Riska Firdaus, 2020) yang dimana peran Pemerintah sebagai Katalisator yaitu mengembangkan sistem pemasaran dari sektor ekonomi kreatif.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil uraian penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Peran Dinas, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan dan Kriya di Desa Wisata Plunturan yang terbagi atas 3 bagian diantaranya Fasilitator, Regulator, Katalisator yaitu sudah ada namun peran yang dijalankan belum dapat optimal. Dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:

1. Seni Pertunjukan

Sebagai Fasilitator, Disbudparpora belum memfasilitasi sarana, prasarana maupun permodalan untuk kegiatan seni

pertunjukan di Desa Wisata Plunturan. Selain itu, belum ada pembinaan yang dilaksanakan oleh Disbudparpora dikarenakan masih terkendala dalam hal koordinasi antar keduanya.

Sebagai Regulator, peran Disbudparpora dalam seni pertunjukan yaitu melalui tugas dari Bidang Ekonomi Kreatif yang sudah ditetapkan di Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019, bawasannya untuk menyiapkan bahan promosi wisata dan ekonomi kreatif untuk event-event regional, nasional, internasional. Disbudparpora sudah menyiapkan event tahunan pada Desa Wisata Plunturan yang dinamakan Festival Plunturan sebagai ajang promosi, dimana didalamnya terdapat pementasan dari berbagai seni pertunjukan yang dimiliki Desa Wisata Plunturan untuk ditampilkan.

Sebagai Katalisator, Disbudparpora masih minim melakukan koordinasi dengan Desa Wisata Plunturan dalam hal seni pertunjukan, dimana terlihat dari adanya perbedaan persepsi antar keduanya, serta bentuk perhatian untuk Desa Wisata Plunturan masih belum ada seperti yang ditunjukkan dengan penghargaan maupun capaian dari Desa Wisata Plunturan, Disbudparpora belum pernah memberikannya.

2. Kriya

Sebagai Fasilitator, Disbudparpora tidak pernah memberikan pembinaan kepada para pelaku kriya, hingga memfasilitasi sarana, prasarana dan permodalan untuk produk kriya yang ada di Desa Wisata Plunturan. Dalam hal ini, masih terdapat keluhan dari pelaku bahwa mengalami keterbatasan modal

untuk menjalankan usahanya. Disbudparpora hanya menerima jika terdapat produk yang diajukan serta dapat memenuhi syarat untuk ikutserta dalam kegiatan pameran yang dilaksanakan oleh Disbudparpora.

Sebagai Regulator, Disbudparpora telah berupaya membantu pelaku kriya di Desa Wisata Plunturan dengan cara melalui SK Bupati Ponorogo yang menerbitkan perizinan untuk penangkaran merak, hal ini berguna bagi pelaku pengrajin dadak merak di Desa Wisata Plunturan. Namun, Disbudparpora masih belum berperan dalam untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas untuk produk kriya.

Sebagai Katalisator, koordinasi yang terjalin antara Disbudparpora dengan Desa Wisata Plunturan perihal kriya masih kurang, akibatnya masih belum ada penyuluhan atau pendampingan yang diberikan untuk Desa Wisata Plunturan. Disisi lain, dalam hal pemasaran Disbudparpora membantu publikasi untuk Desa Wisata Plunturan dengan cara mempromosikan produk-produk kriya melalui pameran yang akan diselenggarakan di Desa Wisata Plunturan. Selain itu, promosi yang dilakukan juga memanfaatkan sosial media resmi Disbudparpora yang berupa instagram, youtube, website.

REKOMENDASI

Berdasarkan data temuan lapangan serta hasil penelitian, maka rekomendasi yang diberikan oleh peneliti terkait Peran Dinas, Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ponorogo dalam Pengembangan Sektor Ekonomi Kreatif Seni Pertunjukan

dan Kriya di Desa Wisata Plunturan yaitu sebagai berikut:

1. Seni Pertunjukan

Kategori	Program	PIU Utama	Stakeholder Terkait
Fasilitasi	Fasilitasi pembuatan proposal proposal kerjasama	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Akses lokasi	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Hubung Seni Pertunjukan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pusat Pembelajaran Seni Pertunjukan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan, Bank lokal
	Pembinaan manajemen seni	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, APPI (Asosiasi Produser Seni Pertunjukan Indonesia), Persewaan
	Fasilitas kemitraan dan perizinan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
Regulasi	Peningkatan literasi seni	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Kebijakan Persewaan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Kebijakan pendapatan dan absensi	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
Katalisator	Kebijakan pengembangan kerajinan seni	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Kemitraan pemerintah dan swasta	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pendampingan kreatif	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, APPI (Asosiasi Produser Seni Pertunjukan Indonesia), NGO, Persewaan
	Pertanggungjawaban	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Kelembagaan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan

2. Kriya

Kategori	Program	PIU Utama	Stakeholder Terkait
Fasilitasi	Pelatihan pembuatan proposal proposal kerjasama	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Hubung dan bantuan modal	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pusat pembelajaran kriya	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pelatihan keterampilan kriya	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pelatihan manajemen produksi kriya	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pelatihan manajemen bisnis kriya	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
Regulasi	Pelatihan perizinan dan administrasi	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Kemitraan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Sistem perizinan terpadu	Disbudparpora Kab. Ponorogo, Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Penerimaan Pajak	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
Katalisator	Sertifikasi kriya dan standar kualitas	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pertandingan IKU	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, KEMENKOTADIM, HEKRI (Asosiasi Industri Hobi dan Hobi-gifts)
	Pertemuan rutin	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
Katalisator	Pembentukan forum kerajinan	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pertanggungjawaban	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Pembinaan keberlanjutan dan etika	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan
	Kelembagaan dan Mentoring	Disbudparpora Kab. Ponorogo	KEMENPARKEKRAF, Akademisi, NGO, Persewaan

DAFTAR REFERENSI

- Ani Sri Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Zainal. (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- A.J, Muljadi. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khadir, Abdul. (2017). *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. CV Dharma Persada
- Lexy J Moleong, (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.

- M.A, Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. America: Pearson Education.
- Pangestu Eka M, dkk. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Sukmadi, dkk. (2021). *Ekonomi Kreatif Berbasis Etnik dan Budaya Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Soedarsono, R.M. (2002). *Seni Pertunjukan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susetyo, B. (2007). *Kajian Seni Pertunjukan*. Semarang: Handout Materi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang
- Anggraeni, D. F. (2018). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata. *JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara*, 2(1), 105-119.
- Muwaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik *Good Governance* di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Media Birokrasi*, 142-156.
- Nurbaya, N. (2022). Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan. *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 8(1), 65-77.
- Puspaningtyas, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Inklusif Dalam Mendukung Desa Wisata Budaya Di Desa Plunturan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 265-282.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ani Sri Rahayu. (2018). *Pengantar Pemerintahan Daerah Kajian Teori, Hukum, dan Aplikasinya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arifin, Zainal. (2013). *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- A.J, Muljadi. (2012). *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Khadir, Abdul. (2017). *Studi Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik*. CV Dharma Persada
- Lexy J Moleong, (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- M.A, Ibrahim. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Neuman, W. Lawrence. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. America: Pearson Education.
- Pangestu Eka M, dkk. (2014). *Ekonomi Kreatif: Kekuatan Baru Indonesia Menuju 2025*. Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Pangestu Eka M. (2009). *Pengembangan Industri Kreatif Menuju Visi Ekonomi Kreatif Indonesia 2025*. Jakarta: Departemen Perdagangan RI.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Pariwisata*. Bandung: Alfabeta.
- Sukmadi, dkk. (2021). *Ekonomi Kreatif Berbasis Etnik dan Budaya Bangsa*. Bandung: Alfabeta.
- Soedarsono, R.M. (2002). *Seni Pertunjukan di Era Globalisasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Susetyo, B. (2007). *Kajian Seni Pertunjukan*. Semarang: Handout Materi Pembelajaran Universitas Negeri Semarang.
- Tim Penyusun Pusat Data dan Sistem Informasi Kemenparekraf. (2020). *Statistik Ekonomi Kreatif 2020*. Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif / Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

2. Jurnal

- Anggraeni, D. F. (2018). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Dalam Pengembangan Objek Wisata. *JMAN jurnal mahasiswa Administrasi negara*, 2(1), 105-119.
- Muwaroh, N. (2019). Peran Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemerintahan yang Baik *Good Governance* di Bidang Pembinaan dan Pengawasan Indikasi Geografis. *Jurnal Media Birokrasi*, 142-156.
- Nurbaya, N. (2022). Peran Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kota Balikpapan Terhadap Pengembangan Ekonomi Kreatif Sektor Seni Pertunjukan. *JURNAL TATA KELOLA SENI*, 8(1), 65-77.
- Puspaningtyas, A. (2021). Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Melalui Pembangunan Inklusif Dalam Mendukung Desa Wisata Budaya Di Desa Plunturan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 7(2), 265-282.
- Puspaningtyas Anggraeny, dkk. (2020). Menggagas Desa Wisata Plunturan Berbasis Kearifan Lokal di Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. *Jurnal Ilmiah Pengabdian Pada Masyarakat*.
- Salambue, R., Fatayat, F., Mahdiyah, E., & Andriyani, Y. (2020). Pengembangan Daya Tarik Objek Wisata Teluk Jering Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multidisiplin*, 3(2), 86-95.
- Sefmiwati, S. (2016). Pengembangan pembelajaran seni kriya menggunakan teknik pemodelan berbasis pendekatan saintifik. *JPGI (Jurnal Penelitian Guru Indonesia)*, 1(1).
- Soetarso, P., & Mulyadin, R. M. (2013). Pembangunan desa wisata: pelaksanaan undang-undang otonomi daerah. *Info Sosial Ekonomi*, 2(1), 37-44.
- SP. Gustami. (2000). Pengembangan Seni Kriya Sebagai Produk Andalan, Makalah Pengelolaan Seni, Direktorat Kesenian, Bogor.
- Tina, T., Parawangi, A., & Malik, I. (2021). Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Camba Cambang Kabupaten Pangkep. *Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik (KIMAP)*, 2(2), 504-519.
- Ulya, M., & Syamsir, S. (2022). Peran Peran Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif sebagai Penggerak

Sektor Pariwisata di Kabupaten Pesisir Selatan. *Journal Of Policy, Governance, Development and Empowerment*, 2(1), 121-130.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 142 Tahun 2018

Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 138 Tahun 2019 Pasal 7 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah

4. Internet

Desa Wisata Plunturan. 2020. Diakses pada 6 Juni 2023 dari <https://desaplunturan.blogspot.com/>

Kata Kreatif Kabupaten Ponorogo. 2023. Diakses pada 22 Juli 2023 dari <https://katakreatif.kemenparekraf.go.id/country/kabupaten-ponorogo>

Plunturan Bersatu. 2020. Diakses pada 6 Juni 2023 dari <http://plunturan-bersatu.blogspot.com/>

Ponorogo Kota Budaya. 2022. Diakses pada 10 April 2023 dari <https://kominformojatimprov.go.id/berita/sah-ponorogo-kota-budaya>

Sugiarto, E.C. 2018. Ekonomi Kreatif Masa Depan Indonesia. Diakses pada 12 April 2023 dari <https://www.setneg.go.id/baca/index/ekonomi-kreatif-masa-depan-indonesia>

Seniman Reog dan Konservasi Dorong Penangkaran Burung Merak. 2022. Diakses pada 5 Juni 2023 dari <https://kanalindonesia.com/2022/03/17/seniman-reog-dan-konservator-dorong-penangkaran-burung-merak/>

